



# Jurnal Ilmu Administrasi **KEBIJAKAN**

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung

★ *Tim Peneliti Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Pasundan*

Analisis Pengaruh Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung

★ *Soleh Suryadi*

Analisis Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Efektivitas Organisasi dalam Perencanaan Penataan Kota

★ *Achdiat*

Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bandung

★ *Bambang Heru*

Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Manajemen Kas Pemerintah Kota Bandung

★ *Kamal Alamsyah*

Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatus Pemerintahan Desa di Kabupaten Cianjur

★ *Tjahjo Sutisnawijaja*

Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata Kota Bandung

★ *Lia Muliawati*

Hubungan Motivasi Kerja Pegawai dengan Kualitas Pelayanan Publik

★ *Iwan Satibi*

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**



**ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP  
EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PERENCANAAN  
PENATAAN KOTA  
(Studi pada Bappeda Kota Bandung)**

**Achdiat**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

**ABSTRACT**

*The development of East Bandung region and the extent of North Bandung region is the development strategic policy of Bandung City Government. The prosperity to develop city settlement to broaden region and distribution of services on structure and infrastructure, and to promote activities of city adapted by environmental support based on Bandung City Strategic Plan. Policy of development strategy to intensify city settlement depends on effectivity of Board of Plan Development Bandung City Region organization shown its capacity to formulate city development plan, product, standard and efficient. Effective development plan will be realized if it's supported by management information system supplied in organization. The study concluded that the management information system affected significantly and positively to the effectivity of organization in Board of Plan Development Bandung City Region. Consciously, there are variables and factors outward management information system affects to gain the effectivity of organization in Board of Plan Development Bandung City Region.*

**Keywords :** *Management information system (MIS) and effectivity of organization*

**A. Pendahuluan**

Perspektif otonomi daerah, dalam konteks pembangunan daerah memiliki konotasi, bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu, dalam rangka perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, harus tetap berada dalam keselarasan dan mengacu pada arah serta kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah, dalam akselerasi tewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, diatur menurut

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah, maka diatur oleh sistem pendanaan yang memadai sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Otonom, dalam konteks penelitian ini adalah Walikota Bandung, dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, dibantu oleh Bappeda Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.



Perumusan perencanaan penataan kota merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, akan terlaksana apabila ditunjang oleh data dan informasi yang memadai, akurat, tepat waktu dan relevan, sesuai kondisi objektif di daerah, oleh karena itu, untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai untuk menunjang efektivitas organisasi dalam penyusunan perencanaan penataan kota, diperlukan sistem informasi manajemen.

Efektivitas organisasi, yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas organisasi Bappeda Kota Bandung, dalam merumuskan perencanaan penataan kota sesuai visi dan misi Perda No. 06 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bandung tahun 2004 yang tepat sasaran, aspiratif dalam arti sesuai kebutuhan masyarakat, dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil peninjauan peneliti, efektivitas Bappeda Kota Bandung belum tercapai, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perencanaan pembangunan di Kota Bandung, berkaitan dengan penataan infrastruktur kota sesuai visi dan misi Kota Bandung, belum terlaksana, sesuai indikator-indikator sebagai berikut:

*Pertama*, produktivitas rencana pada Sub Bidang Sarana dan Prasarana belum tercapai, indikasinya dapat dijelaskan dari perencanaan pembangunan pusat kota baru, yang akan diarahkan ke wilayah Bandung Timur (kawasan Gedebage), sebagai upaya untuk menyeimbangkan segala aktivitas masyarakat dalam perekonomian sektor jasa dan perdagangan masih sebatas *master plan* saja, yaitu Rencana Induk Kota (RIK)/Rencana Umum Tata Kota (RUTK), dan baru dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan PERDA No. 02 Tahun 2004.

*Kedua*, mutu rencana pada Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan mengenai rencana penataan daerah Bandung Utara (Puncut), belum memenuhi harapan berbagai pihak, sehingga menimbulkan pro-kontra diantara Pemerintah, masyarakat, dan DPRD Kota Bandung.

Permasalahan tersebut di atas, menurut dugaan peneliti disebabkan oleh faktor sistem informasi manajemen di Bappeda Kota Bandung, belum terintegrasi secara baik. Adapun indikasinya dapat dilihat sebagai berikut:

*Pertama*, Sub Bidang Data pada Bidang Data dan Statistik Bappeda Kota Bandung, masih sulit mendapatkan informasi dengan tepat waktu, untuk mendukung perencanaan pembangunan kawasan Bandung Timur (Gede Bage), yang meliputi photo udara, data geografis dan topografis, keadaan dan jumlah penduduk, sehingga menghambat persiapan dan pengolahan data dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK), dan Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL). Akibatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan di kawasan Bandung Timur belum dapat dilaksanakan sesuai visi dan misi Kota Bandung.

*Kedua*, Sub Bidang Tata ruang dan Tata Guna Lahan pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Bandung, yang tidak akurat dalam menafsirkan konsep 'daerah pemukiman' dalam pemilahan di kawasan Dago (Puncut), yang tercermin dalam PERDA No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), sehingga mengakibatkan timbulnya pro dan kontra diantara elemen masyarakat atas kebijakan Pemerintah Kota Bandung.



## 2. Identifikasi Masalah

- 1) Berapa besar pengaruh informasi yang Akurat dalam Sistem Informasi Manajemen terhadap Efektivitas Organisasi dalam Perencanaan Penataan kota di Bappeda Kota Bandung.
- 2) Berapa besar pengaruh informasi yang Tepat Waktu dalam Sistem Informasi Manajemen terhadap Efektivitas Organisasi dalam Perencanaan Penataan kota di Bappeda Kota Bandung.
- 3) Berapa besar pengaruh informasi yang Relevan dalam Sistem Informasi Manajemen terhadap Efektivitas Organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung.
- 4) Berapa besar pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung.

## B. Kajian Pustaka, Kerangka Pikir dan Hipotesis

### 1. Kajian Pustaka

Penelitian ini mencoba mengungkap pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan pembangunan, khususnya mengenai perencanaan penataan infrastruktur kota yang meliputi penataan kawasan Bandung Timur dan kawasan Bandung Utara, sebagai masalah aktual saat ini dan menjadi sorotan utama berbagai media massa.

Harian Galamedia, 23 Juni 2004, menyoroti tentang penataan wilayah Bandung Utara yang meliputi Kecamatan Lembang (Kab. Bandung), Dago Utara (Kota Bandung) masih mengundang Pro dan kontra dari berbagai pihak. Fenomena ini diperkuat lagi oleh Ridwan dan Puradimaja (Pikiran Rakyat)

Raperda yang berkaitan dengan pengembangan kawasan Bandung Utara harus ditunda pengesahannya. Pasalnya, antara pihak Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang terkait belum ada titik temu. Terutama, kesepa-katan dalam aspek kuantitatif seperti koefisien dasar bangunan, dan koefisien wilayah terbangun. Bahkan, Skala peta yang dijadikan patokan masih jauh dari realistis. Sebaiknya Perda tersebut disosialisasikan terlebih dahulu dengan seluruh *stake-holder* termasuk perguruan tinggi dan masyarakat.

Pendapat berikutnya mengenai fenomena yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan kawasan Bandung Timur, menurut pernyataan Deny. Rencana Pembangunan Bandung Timur Tidak Jelas. Melalui <<http://www.bappeda-bandung.go.id/>> [2005]:

BAPPEDA mengusulkan pengembangan waduk, sarana olah raga, ruang terbuka hijau, terminal bus terpadu, terminal peti kemas, area bisnis dan perkantoran, industri, dan pasar hewan. Waduk diusulkan berada di bagian tengah kawasan terpadu gedebage. Sementara itu, Dinas Pengairan mengusulkan pembuatan waduk di sisi selatan kawasan terpadu. Namun, sebagian selatan kawasan itu telah dimiliki masyarakat dengan ijin lokasi untuk perumahan.

Perencanaan pengembangan kawasan Bandung Timur dianggap tidak jelas, seperti apa yang dikatakan oleh Oetomo. Pemerintah Kota Tidak Siap. Melalui <<http://www.bappeda-andung.go.id/>> [2005]:

Ketidakjelasan program dan target pemerintah mengindikasikan Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki kesiapan dalam mengembangkan kawasan Bandung Timur. Bagaimana menanamkan modal kalau pemerintah tidak memiliki rencana dan target pembangunan yang jelas.

Kajian teoritis tentang konsep administrasi negara mengacu pada



paradigma administrasi negara yang ke 5 (lima), yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara, dengan pertimbangan *locus* dan *focus* yang dikemukakan oleh Henry dalam Miftah Thoha (1986:39), ialah:

Sebagaimana yang terlihat dalam trend yang diikuti oleh paradigma ini, maka *focus* administrasi negara adalah teori organisasi, praktika dalam public policy, teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Adapun *locus* normatif dari administrasi negara digambarkan paradigma ini ialah birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakatat (*public affairs*).

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya peneliti akan menguraikan pengertian administrasi negara menurut Waldo dalam Slamet W. Admosoedarmo (1986:17-18), sebagai berikut :

- 1) *Public Administration*, adalah organisasi dan *management* dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
- 2) *Public Administration*, adalah suatu seni dan ilmu tentang *management* yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Penggunaan rangkap dari istilah *public administration* tersebut dijelaskan pula maksudnya, agar lebih mudah untuk menempatkan *public administration* sebagai ilmu, jika diingat akan fungsinya yang nampak sebagai suatu studi yang sistematis, dan sebagai seni jika diingat akan fungsi praktisnya. Istilah administrasi negara sebagai fungsi mempunyai dua pengertian menurut pendapat Atmoedirdjo (1982:273), yaitu:

- 1) Administrasi Negara adalah "Administrasi" dari pada Negara sebagai "Organisasi"
- 2) Administrasi Negara adalah "Administrasi" yang mengejar tercapainya

tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, artinya : yang ditetapkan oleh atau melalui undang-undang. "Administrasi" disini dapat diartikan sebagai "*the over all management of an organization*" yang terdiri atas *Organization Development, Top Management, Information Handling Management and activities* (manajemen daripada kegiatan-kegiatan manusia dan non manusia) atau disingkat: (1) Mengembangkan Organisasi; (2) Mengembangkan sistem informasi; (3) Mengembangkan sistem Manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa administrasi negara sebagai fungsi dalam konteks kelembagaan negara, dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan dalam pengertian pencapaian tujuan-tujuan negara dilaksanakan oleh setiap pejabat negara dan pejabat daerah, yang memimpin dan bertanggungjawab terhadap suatu organisasi pemerintahan/kenegaraan, dalam bentuk Departemen, Direktorat atau Dinas, Biro, dan Kantor, baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten.

Lahirnya konsep otonomi daerah yang menekankan pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten, merupakan bentuk kesadaran kekuasaan terhadap kepentingan masyarakat, bahwa hegemoni dan dominasi pusat terhadap daerah, ataupun pemerintah terhadap masyarakat, tidak lagi dapat menyelesaikan dan mengurus semua kepentingan negara dan yang berkaitan dengan *public affairs*, seperti apa yang dinyatakan oleh Ndruha (1989:4) :

Bahwa pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang terhadap azas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan. Azas kedaerahan mengandung



dua macam prinsip, yaitu: 1). Dekonsentrasi, pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintah Pusat yang berada di daerah. 2). Desentralisasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yang menimbulkan hak mengurus kepengurusan rumah tangga sendiri bagi badan politik di daerah.

Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, maka Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar pula, karena pemerintah daerah otonom secara langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten diharapkan memiliki kemampuan yang optimal, untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerahnya.

Demikian pula halnya, dengan Pemerintah Kota Bandung sebagai daerah otonom, yang memiliki kewenangan dan berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan urusan dan kepentingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerahnya.

Hubungan antara administrasi, organisasi dan manajemen dapat dijelaskan melalui sebuah analogi yang dikemukakan oleh Waldo dalam Slamet W. Admosoedarmo (1986:25), ialah :

Organisasi kita ibaratkan sebagai anatomi daripada administrasi, sedang manajemen sebagai fisiologinya. Organisasi menunjukkan struktur dari-

pada administrasi sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung dan tak dapat dipisahkan satu daripada yang lain sebagaimana halnya anatomi dan fisiologi daripada setiap organisme hidup.

Analogi Waldo di atas menjelaskan bahwa hubungan antara administrasi, organisasi dan manajemen merupakan hubungan yang bersifat sistemik, di mana bagian yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan berhubungan secara fungsional. Oleh karena itu, Atmosudirdjo (1982:77), memandang teori organisasi sebagai *the systems Theory of Organization*, yaitu :

Kita harus memandang terhadap organisasi tersebut sebagai suatu jaringan (*network*) daripada berbagai macam sistem yang berkaitan satu sama lain, serta bekerja dan bergerak berdasarkan tatakaitan sistem yang tertentu, dan masih berada dalam perkembangan terus, terutama dalam rangka gerakan manajemen sistem (*system management*) dan kibernetika (*cybernetics*).

Teori yang memperkuat tentang gerakan manajemen sistem diuraikan oleh Terry dalam Winardi (1986:29-30), sebagai berikut:

Pihak menejer mengintegrasikan fasilitas-fasilitas yang tersedia ke arah pencapaian tujuan melalui alat sistem-sistem yang menghubungkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk hasil akhir. Sistem berguna sebagai media melalui apa pihak menejer beroperasi. Komputer banyak sekali membantu dalam hal mengimplementasi manajemen sistem. Manajemen sistem memungkinkan seorang manajer menggunakan konsep-konsep luas, untuk menjangkau bidang-bidang luas, dan mengurangi penghalang-penghalang.



Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kibernetika (*cybernetics*) dikemukakan oleh Rakhmat (1995:67), adalah :

*Cybernetics* berasal dari bahasa Yunani, *kybernetes* (penyetir, pilot, pengontrol, pengatur). 1. Kajian tentang mekanisme umpan balik, sistem komunikasi, dan kontrol yang ditemukan dalam mesin-mesin dan dalam organisme hidup. 2. Kajian tentang bagaimana sistem mekanis dapat dianggap adaptif. 3. Kajian tentang aspek-aspek pengatur diri dari sebuah otomat artifisial (dan organisme hidup) yang menampakkan kemanfaatan dan fungsi-fungsi lain yang secara tradisional telah dilekatkan pada aktivitas sebuah pikiran.

Menurut pandangan di atas, dapat dipahami bahwa organisasi dan manajemen merupakan sistem kerja, di mana didalamnya terdapat subsistem-subsistem yang satu sama lainnya saling terikat dan berhubungan untuk bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini telaah terhadap sistem informasi manajemen merupakan salah satu subsistem dari sistem organisasi dan manajemen, sebagai fasilitas yang harus dikembangkan dalam rangka menghubungkan setiap aktivitas yang ada dalam organisasi dan manajemen, yang diintegrasikan ke dalam mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## 2. Kerangka Pikir

Tujuan organisasi di masa depan, sangatlah ditentukan oleh perencanaan yang dilakukan pimpinan organisasi, perencanaan masa depan organisasi berkaitan dengan sistem informasi manajemen yang tersedia, seperti halnya dinyatakan oleh Siagian (1984:4), yaitu : *Management information system* akan

memungkinkan pimpinan merencanakan ke arah mana organisasi hendak dibawa. Tegasnya, suatu *management information system* yang baik adalah sistem yang berorientasi ke masa depan.

Pendapat Davis diterjemahkan Andreas S. Adi Wardana (1984:6) :

Sistem informasi manajemen ialah sebuah konsep dan suatu orientasi ke arah mana menuju sebuah rancangan yang mutlak, yang paling penting adalah sampai batas mana sebuah sistem informasi menerapkan orientasi sistem informasi manajemen.

Pengelolaan sistem informasi manajemen, untuk menunjang operasional manajemen dan pengambilan keputusan, menurut Syamsi (2000:102) :

Tekanan sistem informasi manajemen itu pada sistemnya, bukan pada manajemennya. Namun, agar sistem informasi manajemen itu berlangsung dengan efektif dan efisien, sudah barang tentu perlu dikelola (*managed*) sebaik-baiknya.

Kriteria kualitas informasi dikatakan Supriyono (1987:298) :

- 1) Akurat, informasi harus benar dan sesuai realitas;
- 2) Tepat waktu, tidak terlambat dan baru serta masih segar;
- 3) Relevan, informasi bermanfaat bagi pemakainya sebagai bahan koreksi terhadap informasi sebelumnya.

Kualitas informasi dijelaskan Jogiyo (1991:23) :

- 1) Akurat : mengandung arti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Akurat juga mengandung makna harus mencerminkan maksudnya. Informasi ini harus akurat karena sumber informasi sampai pada si penerima kemungkinan banyak terjadi hambatan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.
- 2) Tepat waktu: mengandung arti bahwa informasi yang datang pada penerima



tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan) Relevan : mengandung arti bahwa informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya dan informasi dapat berguna secara langsung untuk pemakainya.

Teori efektivitas organisasi, dikemukakan oleh Indrawijaya (1983:212): "Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya".

Pendapat Gibson (1996:38), mengatakan:

Bahwa efektivitas organisasi adalah keberhasilan organisasi untuk menunjukkan kemampuannya mencapai tujuannya. Tujuan didasarkan pada pandangan bahwa organisasi bersifat rasional, satu kesatuan yang mempunyai misi tertentu, tujuan dan sasaran.

Sedangkan, kriteria efektivitas organisasi dikemukakan Gibson (1996:50), diantaranya :

- 1) Tujuan, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu/pencapaian sasaran dari upaya bersama, dengan menspesifikasikan terlebih dulu sasaran yang hendak dicapai;
- 2) Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan. Ukuran ini, berkaitan langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan dan klien organisasi yang dilayani;
- 3) Mutu, Sebagai memenuhi harapan pelanggan dan klien untuk kinerja produk dan jasa;
- 4) Efisiensi, diartikan sebagai rasio keluaran dibanding masukan. Ukuran

efisiensi dalam bentuk rasio manfaat *versus* biaya, keluaran, atau waktu;

- 5) Fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi dalam menjawab lingkungan eksternal. Ukurannya, organisasi perlu menginvestasikan tidak hanya dalam bentuk teknologi dari metode produksi yang fleksibel, tetapi juga dalam pengembangan kemampuan karyawan dalam mengoperasikan teknologi;
- 6) Kepuasan, ditujukan pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi. Ukuran kepuasan termasuk sikap karyawan, keluar masuk karyawan, tingkat absensi, keterlambatan dan keluhan.

### 3. Hipotesis

1. Besarnya pengaruh SIM terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan Penataan kota di Bappeda Kota Bandung ditentukan oleh dimensi informasi yang akurat.
2. Besarnya pengaruh SIM terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung ditentukan oleh dimensi informasi yang tepat waktu.
3. Besarnya pengaruh SIM terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung ditentukan oleh dimensi informasi yang relevan.
4. Besarnya Pengaruh SIM terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung ditentukan oleh dimensi informasi yang akurat, informasi yang tepat waktu, dan informasi yang relevan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe rancangan *eksplanatory* dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey, maksudnya ialah untuk menjelaskan secara analitis hubungan antara variabel-



variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, Singarimbun (1981:3).

Populasi, menurut Sugiyono (1997:57) sebagai berikut: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan-nya". Populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah para pegawai Bappeda Kota Bandung, yang keseluruhannya berjumlah 65 orang pegawai. Anggota populasi yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini berjumlah 33 orang pegawai yang tersebar pada Bidang Data dan Statistik, serta Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda kota Bandung sebagai responden. Teknik sampling yang digunakan mengacu pada pendapat Sugiyono (1997:61-62), yaitu teknik *non probability sampling*, dengan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Bappeda, sedangkan 32 orang responden ( $n = 32$ ) akan diberikan angket.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : 1) Studi Kepustakaan; 2) Studi Lapangan, terdiri dari : (1) Observasi Non Partisipan; (2) Wawancara dengan Kepala Bappeda; (3) Angket, penyebaran daftar pertanyaan yang telah dilengkapi alternatif jawabannya kepada responden.

Uji Validitas, Arikunto (1998:160) menjelaskan bahwa tinggi rendahnya, validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Alat pengujian yang dipakai adalah korelasi *Product*

*Moment* dari Karl Pearson dalam Arikunto (1998:162), sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

R = Koefisien validitas butir pernyataan yang dicari

n = Banyaknya responden (di luar sampel penelitian yang sebenarnya)

X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

Y = Skor total yang diperoleh subyek dari seluruh item

$\sum X$  = Jumlah skor dalam distribusi X

$\sum Y$  = Jumlah skor dalam distribusi Y

$\sum X^2$  = Jumlah kuadrat masing-masing distribusi X

Uji reliabilitas angket dalam penelitian ini, diukur dengan menggunakan interval consistency dengan teknik belah dua (*split half*) dari Spearman-Brown dalam Sugiyono (1997:109), dengan model matematisnya adalah :

Di mana :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b} \quad r_i = \text{Reliabilitas}$$

$r_b$  = Korelasi antara belahan ganjil dan belahan genap

Data yang telah diolah lalu diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*), yaitu melihat besarnya pengaruh dari variabel Sistem Informasi Manajemen terhadap Efektivitas Organisasi Bappeda Kota Bandung dalam perencanaan pembangunan khususnya mengenai perencanaan penataan infrastruktur kota.



## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Deskripsi Perencanaan Fisik Prasarana dan Sarana Kota sesuai Renstra 2004 mencanangkan isu strategis penataan kota sebagai salah satu misi dan arah kebijakan dalam perencanaan jangka menengahnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Kondisi perkembangan fisik Kota Bandung saat ini belum menunjukkan teraturan yang cukup menunjang pencapaian visi kota;
- 2) Menurunnya daya dukung lingkungan, tuntutan dan dinamika perkembangan kota telah menyebabkan kurang terkendalinya pengembangan kawasan terbangun, sehingga menurunkan daya dukung lingkungan.
- 3) Masalah transportasi; Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi merupakan penyebab utama masalah kemacetan lalulintas di Kota Bandung;
- 4) Masalah Banjir; Banjir merupakan salah satu kendala yang terjadi di kota Bandung, karena topografinya yang berupa cekungan dan menurunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Tujuan dari pelaksanaan misi kota, adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota yang sesuai dengan potensi dan berwawasan lingkungan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari misi Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kota; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan sistem transportasi kota; 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota; 4) Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan; 5) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang kota.

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan penataan kota, ialah

dengan mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota, serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui :

- 1) Program Penataan Prasarana dan Sarana Kota;
- 2) Program Pengembangan Kawasan Gede Bage;
- 3) Program Penataan Transportasi Kota;
- 4) Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- 5) Program Penataan Lingkungan Pemukiman;
- 6) Program Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah.

### 2. Pembahasan

#### 1) Pengujian Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis dilakukan melalui uji statistik, dengan menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Hipotesis yang menyatakan bahwa dimensi sistem informasi manajemen yang terdiri atas dimensi Akurat ( $X_1$ ), dimensi Tepat Waktu ( $X_2$ ), dan dimensi Relevan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap efektivitas organisasi pada Bappeda Kota Bandung, sedangkan pengujian dilakukan secara simultan dan parsial.

Untuk menguji apakah ada pengaruh baik secara simultan maupun secara parsial dari tiga dimensi sistem informasi manajemen terhadap efektivitas organisasi pada Bappeda Kota Bandung, terlebih dahulu perlu ditempuh langkah-langkah yang diajukan oleh Nirwana K. Sitepu (Modifikasi Harun Al-Rasyid, 1994 :19-29), adapun hasil pengujiannya ialah:

■ Untuk menghitung besarnya pengaruh dari:

(1)  $X_1$  ke  $Y$

Pengaruh langsung  $(0,317)^2 = 0,100 = 10 \%$

Pengaruh tidak langsung yang melalui hubungan korelatif dengan:

$X_2 = (0,317 \times 0,837 \times 0,403) = 0,107 = 10,7 \%$



$$X_3 = (0,317 \times 0,814 \times 0,223) = 0,058 = 5,8 \%$$

Pengaruh Total  $X_1$  ke  $Y$

$$10, \% + 10,7 \% + 5,8 \% = 26,5 \%$$

(2)  $X_2$  ke  $Y$

$$\text{Pengaruh langsung } (0,403)^2 = 0,162 = 16,2 \%$$

Pengaruh tidak langsung yang melalui hubungan korelatif dengan:

$$X_1 = (0,403 \times 0,837 \times 0,317) = 0,107 = 10,7 \%$$

$$X_3 = (0,403 \times 0,761 \times 0,223) = 0,068 = 6,8 \%$$

Pengaruh Total  $X_2$  ke  $Y$

$$16,2 \% + 10,7 \% + 6,8 \% = 33,8 \%$$

(3)  $X_3$  ke  $Y$

$$\text{Pengaruh langsung } (0,223)^2 = 0,050 = 5,0 \%$$

Pengaruh tidak langsung yang melalui hubungan korelatif dengan:

$$X_1 = (0,223 \times 0,814 \times 0,317) = 0,058 = 5,8 \%$$

$$X_2 = (0,223 \times 0,761 \times 0,403) = 0,068 = 6,8 \%$$

Pengaruh Total  $X_3$  ke  $Y$

$$5,0 \% + 5,8 \% + 6,8 \% = 17,6 \%$$

(4) Pengaruh bersama-sama  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  terhadap  $Y$

$$0,265 + 0,338 + 0,176 = 0,779 = 77,9 \%$$

Pengaruh Variabel Lain (Epsilon)

$$(0,470)^2 = 0,221 = 22,1 \%$$

$$\text{Jadi pengaruh seluruh variabel} = 77,9 \% + 22,1 \% = 100 \%$$

2) Analisis Parsial Pengaruh SIM Terhadap Efektivitas Organisasi Dalam Perencanaan Penataan Kota Di Bappeda Kota Bandung.

(1) Dimensi Informasi Akurat

Pengaruh informasi yang akurat terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung, yaitu sebesar 26,5 %. Pengaruhnya bersifat positif dan signifikan,

artinya makin akurat informasi yang diperoleh, maka akan makin efektif organisasi Bappeda Kota Bandung, dalam merumuskan perencanaan penataan kota.

(2) Dimensi Informasi Tepat Waktu

Pengaruh informasi yang tepat waktu terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung, adalah sebesar 33,8 %. Pengaruhnya bersifat positif dan signifikan, artinya makin tepat waktu informasi yang diperoleh, maka akan makin efektif organisasi BAPPEDA Kota Bandung, dalam merumuskan kebijakan perencanaan penataan kota.

(3) Dimensi Informasi Relevan

Pengaruh informasi yang relevan terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung, yaitu sebesar 17,6%. Pengaruhnya bersifat positif dan signifikan, artinya makin relevan informasi yang diperoleh, maka akan makin efektif organisasi Bappeda Kota Bandung, dalam merumuskan perencanaan penataan kota.

3) Analisis Simultan Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Organisasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengujian statistik, menjelaskan bahwa secara simultan sistem informasi manajemen telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung, yaitu sebesar 77,9%. Hal ini, mencerminkan bahwa bentuk hubungan antar variabel telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Adapun, hipotesis yang diajukan peneliti, adalah "Besarnya pengaruh



sistem informasi manajemen terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung ditentukan oleh dimensi informasi yang akurat, informasi yang tepat waktu, dan informasi yang relevan", secara empiris telah teruji kebenarannya.

- 4) Faktor Lain yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Dalam Perencanaan Pembangunan di Luar Variabel Sistem Informasi Manajemen.

Faktor lain yang turut mempengaruhi variabel efektivitas organisasi di luar sistem informasi manajemen yaitu sebesar 21,50%. Adapun, mengenai faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, antara lain faktor koordinasi, motivasi, dan profesionalisme pegawai.

## E. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- 1) Sistem informasi Manajemen baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota di Bappeda Kota Bandung, artinya semakin tinggi keberhasilan sistem informasi manajemen, semakin tinggi pula tingkat efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam perencanaan penataan kota, maka Bappeda Kota Bandung seyogyannya menempatkan skala prioritas dalam melaksanakan sistem informasi manajemen, terutama berkaitan dengan dimensi informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan.
- 2) Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa efektivitas organisasi Bappeda Kota Bandung dalam perencanaan

penataan kota tidak hanya dipengaruhi oleh variabel sistem informasi manajemen saja, tetapi juga dipengaruhi faktor lain (ε). Faktor-faktor tersebut antara lain faktor koordinasi, motivasi, dan profesionalisme pegawai.

## 2. Saran

### 1) Saran Akademik

- a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang fenomena tidak tercapainya efektivitas organisasi dalam perencanaan pembangunan daerah, secara spesifik perencanaan penataan Kota dikaitkan dengan sistem informasi manajemen (SIM) dari perspektif yang berbeda, baik melalui pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner.
- b. Kajian tentang SIM secara empirik berkaitan dengan sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, kajian dan penelitian masalah ini, dapat membantu pemerintah daerah otonom dalam konteks perencanaan penataan kota sesuai kebijakan otonomi daerah.

### 2) Saran Praktis

- a. Perlu dilaksanakan koordinasi secara intensif, baik internal di Bappeda, maupun eksternal dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka optimalisasi kerja sama guna mendukung efektivitas penyusunan dokumen perencanaan penataan kota.
- b. Memotivasi para pegawai melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai tanggung jawab profesi, menumbuhkan kesadaran akan peran penting Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan kota, sehingga diharapkan akan tumbuh *'esprit de corps'*, disiplin dan tanggung jawab



- pegawai, serta pengeliminiran 'ego sektoral' dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perlu dilaksanakan diklat pegawai secara intensif dan bersifat *sustainable* (berkelanjutan), yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM erencana yang profesional, handal dan akuntabel.
  - d. Pembangunan jaringan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi (*information of teknologi*) perlu secepatnya direalisasikan, dalam rangka memberi daya dukung yang konstruktif terhadap perencanaan penataan kota.
- Siegel, Sidney. 1997. *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Terjemahan Zanzawi Suyuti. Jakarta : Gramedia.
- Singarimbun, Masri & sofian Effendi. 1982. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3S.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyono, R.A. 1987. *Konsep Dasar Manajemen dan Proses Perencanaan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Davis, Gordon B. 1984. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Terjemahan Andreas S. Adi Wardana. Jakarta: Pustaka Bina Pressindo.
- Gibson, James L. & John M. Ivancevich. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Terjemahan Nunuk Adiarni. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Herianto, Dicky. 2003. *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan Operasional Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat*. Tesis. PPS. Universitas Padjadjaran Bandung.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 1983. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.
- Jogiyanto. 1991. *Analisis Dan Disain Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Siagian, Sondang P. 1984. *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Dokumen-Dokumen :
- Deny. Rencana Pembangunan Bandung Timur Tidak Jelas. Melalui <<http://www.bappeda-bandung.go.id/>>[2005].
- Oetomo, Andi. Pemerintah Kota Tidak Siap. Melalui<<http://www.bappeda-bandung.go.id/>> [2005]
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Bandung.
- Keputusan Walikota Bandung Nomor 328 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kota Bandung.